



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



INGAT..!!
Mulai 1 Juli 2020
Pencetakan Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil
Menggunakan Kertas Putih HVS A4 80 Gram
Sesuai Permendagri No.109 Pasal 12 Tahun 2019

Baru



LKPJ
Tahun 2022

JL. MAWAR NO. 5 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21797 FAX. (0728) 21797
KODE POS 34811
2022

KATA PENGANTAR

Untuk menjawab sebuah hasil kinerja instansi pemerintah dalam era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, tugas pokok, fungsi dan kinerja seluruh Dinas instansi pemerintah terus menerus dipantau oleh masyarakat sebagaimana terlihat dengan berkembangnya kritikan masyarakat terhadap pemerintah dalam menilai keberhasilannya melaksanakan pemerintahan yang baik berupa aparatur yang bersih, bebas KKN serta perlunya akuntabilitas publik pemerintah sebagai jawaban dari kenerjanya.

Dalam kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat perlu untuk melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggung jawabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga diharapkan dengan evaluasi yang dilakukan kita mampu melakukan evaluasi dan koreksi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan sekaligus memenuhi harapan masyarakat Lampung Barat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan

yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawab ini masih banyak yang perlu mendapat penyempurnaan-penyempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk sebuah kemajuan dan kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini.

Liwa, Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661220 199303 1 007

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam kompleksitas dinamika kehidupan bangsa dimasa yang akan datang, kita dituntut untuk mempersiapkan seluruh komponen bangsa agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan dan menghadapi berbagai tantangan yang timbul. Institusi Pemerintah sebagai salah satu komponen sistem penyelenggaraan Negara memiliki posisi penting dalam mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu unsur pemerintah menghadapi permasalahan dan tantangan yang sama dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan refleksi dan proyeksi agar bisa mendominasi fungsi dan mengoptimalkan peran serta kontribusinya bagi pembangunan Bangsa baik jangka pendek maupun yang fundamental dan berjangka panjang.

Laporan ini dimaksudkan sebagai informasi penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat tentang Arah Kebijakan Umum, Pengelolaan Keuangan, Penyelenggaraan tugas umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5657)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka

menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Lampung Barat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
17. Peraturan Bupati No 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Lampung Barat

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 VISI

Visi RPJMD Kabupaten Lampung Barat merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Lampung Barat yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih masa jabatan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat HEBAT dan SEJAHTERA"

Dengan penjelasan sebagai berikut :

HEBAT : Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa

SEJAHTERA : Merupakan Tujuan akhir tau keadaan yang diharapkan

Makna VISI : Masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai.

1.2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan Infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawaskan lingkungan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya local.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan public, dan
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Maka Misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Pernyataan Misi ke 4 (Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil),
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik

2. DATA UMUM DAERAH

C.1 Data Geografis Wilayah

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 3.368.14 km² setelah terjadi pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung dan mempunyai garis pantai sepanjang 260 km. Lampung Barat terletak pada koordinat 4°, 47',16"-5°, 56', 42" lintang selatan dan 103°, 35', 08" - 104°, 33', 51" bujur timur

Adapun batas wilayah Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatra Selatan)
- Sebelah Selatan : Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus
- Sebelah Barat : Ka. Pesisir Barat
- Sebelah Timur : Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, dan Kab. Tanggamus

C.2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester I tahun 2022, yang dikeluarkan Oleh Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

Tabel I
Data Penduduk Kabupaten Lampung Barat
Berdasarkan Data DKB Semester I 2022
Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri

NO	KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH
1	BALIK BUKIT	21.906	20.663	42.569
2	SUMBER JAYA	12.586	11.689	24.275
3	BELALAU	6.474	6.042	12.516
4	WAY TENONG	17.803	17.054	34.857
5	SEKINCAU	9.883	9.062	18.945
6	SUOH	9.818	8.853	18.671
7	BATU BRAK	7.863	7.294	15.157
8	SUKAU	13.206	12.305	25.511
9	GEDUNG SURIAN	8.823	8.294	17.117
10	KEBUN TEBU	10.797	10.280	21.077
11	AIR HITAM	6.519	5.858	12.377
12	PAGAR DEWA	9.118	8.055	17.173
13	BATU KETULIS	7.154	6.419	13.573
14	LUMBOK SEMINUNG	4.517	3.981	8.498
15	BANDAR NEGERI SUOH	13.576	11.926	25.502
JUMLAH		160.043	147.775	307.818

BAB II

PENJABARAN APBD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu lembaga teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan pada setiap urusan sesuai dengan target dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan 1 Bidang Urusan	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan 1 bidang urusan			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 19 dokumen	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 19 dokumen				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun 8 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun 8 dokumen				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen				
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun 1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun 1 dokumen				
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun 1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun 1 dokumen				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen				
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	perangkat daerah yang disusun 1 dokumen	perangkat daerah yang disusun 1 dokumen				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di susun 4 dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di susun 4 dokumen				
			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di sediakan Gaji dan Tunjangannya 28 ASN	Jumlah ASN yang di sediakan Gaji dan Tunjangannya 28 ASN				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 1 dokumen				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 dokumen				

			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang di laksanakan administrasi umumnya 6 sub organisasi	Jumlah sub organisasi yang di laksanakan administrasi umumnya 6 sub organisasi			
			Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan 12 jenis	Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan 12 jenis			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan (Kantor Disduk) 5 jenis	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan (Kantor Disduk) 5 jenis			
				Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (UPT Disduk) 1 jenis	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (UPT Disduk) 1 jenis			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan 4 SKHU	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan 4 SKHU			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah sub organisasi penyediaan makanan dan minuman tamu 5 sub organisasi	Jumlah sub organisasi penyediaan makanan dan minuman tamu 5 sub organisasi			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan 37 Paket	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan 37 Paket			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang di sediakan Urusan Pemerintahan Daerahnya 6 sub organisasi	Jumlah sub organisasi yang di sediakan Urusan Pemerintahan Daerahnya 6 sub organisasi			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Masuk dan surat keluar 800 surat	Jumlah surat Masuk dan surat keluar 798 surat			
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar (Kantor Disduk) 5 rekening	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar (Kantor Disduk) 5 rekening			
				Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar (UPT Disduk) 3 rekening	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayar (UPT Disduk) 3 rekening			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantor (kantor disduk) 5 sub organisasi	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantor (kantor disduk) 5 sub organisasi			
				Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantor (UPT disduk) 1 sub organisasi	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantor (UPT disduk) 1 sub organisasi			

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 20 jenis	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 20 jenis			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraannya 4 kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraannya 4 kendaraan			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 9 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 9 jenis			
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase wajib KTP yang sudah rekam 96,50 %	Persentase wajib KTP yang sudah rekam 107,3 %			
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah produk pelayanan pendaftaran penduduk 4 produk	Jumlah produk pelayanan pendaftaran penduduk 4 produk			
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Operator SIAK 57 orang	Jumlah Operator SIAK 57 orang			
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Orang yang Direkam 5.000 orang	Jumlah Orang yang Direkam 4.454 orang			
					Jumlah Orang yang Diterbitkan KIA 35.000	Jumlah Orang yang Diterbitkan KIA 28.893			
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran 96%	Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran 99,93%			
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Akta yang diterbitkan 15.000	Jumlah Dokumen Akta yang diterbitkan 9700			
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Validasi Data Penduduk 94%	Persentase Peningkatan Validasi Data Penduduk 94,07%			
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah jenis laporan kependudukan yang disajikan 12 laporan	Jumlah jenis laporan kependudukan yang disajikan 12 laporan			
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah jenis laporan yang disajikan 16 jenis	Jumlah jenis laporan yang disajikan 16 jenis			
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah buku agregat kependudukan yang di cetak 10 buku	Jumlah buku agregat kependudukan yang di cetak 10 buku			
				Penyajian Data Kependudukan yang akurat	Jumlah buku agregat kependudukan yang di cetak 10	Jumlah buku agregat kependudukan yang di cetak 10			

			dan dapat dipertanggung jawabkan	buku	buku			
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pekon yang dibina (Pekon GISA) 1 pekon	Jumlah Pekon yang dibina 1 pekon			
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pekon yang dibina (Pekon GISA) 1 pekon	Jumlah Pekon yang dibina 1 pekon			
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri 100%	Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri 100%			
			Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Data Perkembangan Penduduk yang dicetak 35 buku	Jumlah Buku Profil Data Perkembangan Penduduk yang dicetak 35 buku			
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil kependudukan yang dicetak 35 buku	Jumlah Buku Profil kependudukan yang dicetak 35 buku			

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS

Tidak ada kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan masalah yang diambil oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dikarenakan tidak terdapat masalah dalam upaya pencapaian target.

TINDAK LANJUT CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD KAB. LAMPUNG BARAT

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	<p>Memaksimalkan pelayanan serta terus menjalin hubungan yang baik dengan aparat pekon sampai pemangku dalam pendataan kependudukan apakah bertambah berkurang tentunya dengan prinsip kebersamaan bukan atasan dengan bawahan. Sehingga dalam penggunaannya, data yang ada dapat dipertanggungjawabkan dengan baik</p>	<p>Pada Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Program/kegiatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan , Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program pengelolaan profil kependudukan : kegiatan penyusunan profil kependudukan 	<p>Dengan adanya Program dan Kegiatan tersebut maka berdampak terhadap peningkatan pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten lampung barat.</p> <p>Berbagai pelayanan yang dilakukan antara lain pelayanan jemput bola ke Kecamatan dan Pekon, Pelayanan jemput bola ke rumah penyandang disabilitas dan ODGJ .</p> <p>perekaman KTP ke Sekolah-sekolah SMA , Penetapan KIA sebagai salah satu syarat masuk sekolah hingga penggunaan KIA sebagai Nomor BPJS.</p> <p>Tercapainya indikator indeks kepuasan masyarakat IKM yang dilakukan melalui survey mandiri mendapatkan predikat A sesuai target yang ditentukan.</p>

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661220 199303 1 007

BAB IV
PENJABARAN APBD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu lembaga teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tidak melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan.

BAB V
P E N U T U P

1.1 Anggaran dan Realisasi

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dengan pagu anggaran Belanja Daerah sebesar **Rp. 4.719.880.832,-** (*empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 4.577.233.282,-** atau 96,98%, dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Belanja Langsung			
		Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.719.880.832	4.577.233.282	96,98%	142.647.550
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.734.000	15.984.800	95,52%	749.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	10.638.000	9.888.800	92,96%	749.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	435.000	435.000	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	435.000	435.000	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	483.000	483.000	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	483.000	483.000	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100%	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	3.260.000	3.260.000	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.952.109.032	2.885.723.932	97,75%	66.385.100
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.946.609.032	2.880.223.932	97,75%	66.385.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	100%	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	1.000.000	100%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.000.000	100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.549.600	199.772.869	99,61%	776.731
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.131.600	3.131.600	100%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.500	31.000.000	99,99%	500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	3.960.000	100%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.312.500	4.312.500	100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.145.000	157.368.769	99,51%	776.731
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.235.400	182.644.863	79,33%	47.590.537
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000	3.600.000	87,80%	500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000	42.071.163	51,94%	38.928.837
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.135.400	136.973.700	94,38%	8.161.700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.075.000	116.073.640	98,31%	2.001.360
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.990.000	100.988.640	98,06%	2.001.360
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.085.000	15.085.000	100%	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.031.357.200	1.007.835.650	97,72%	23.521.550
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.031.357.200	1.007.835.650	97,72%	23.521.550
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	562.000.000	562.000.000	100%	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	469.357.200	445.835.650	94,99%	23.521.550
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	65.512.000	64.829.000	98,96%	683.000
Pelayanan Pencatatan Sipil	65.512.000	64.829.000	98,96%	683.000
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	65.512.000	64.829.000	98,96%	683.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	66.385.600	66.008.028	99,43%	377.572
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	22.689.000	22.618.079	99,69%	70.921
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	22.689.000	22.618.079	99,69%	70.921

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.000.000	22.983.349	99,93%	16.651
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	23.000.000	22.983.349	99,93%	16.651
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.696.600	20.406.600	98,60%	290.000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.696.600	20.406.600	98,60%	290.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	38.923.000	38.360.500	98,55%	562.500
Penyusunan Profil Kependudukan	38.923.000	38.360.500	98,55%	562.500
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	38.923.000	38.360.500	98,55%	562.500

Didalam pelaksanaan program Kerja dan kegiatan ini kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu perbaikan baik penyusunan maupun data pendukung lainnya, karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kebaikan dari program dan kegiatan ini dimasa yang mendatang.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19661220 199303 1 007